

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 61 /PK/2019

Tanggal : 31 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SANGGAU**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 1407

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 3</p> <p>Nama Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :</p> <p>a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;</p> <p>b. Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau;</p> <p>c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau; dan</p> <p>d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi <del>serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum memiliki IMB.</del></p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan atau yang meliputi bangunan baru dan/atau mengubah, dan/atau merenovasi.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan/</p>	1. Sesuai dengan UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002, terhadap bangunan yang tidak memiliki izin

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pengendalian penyelenggaraan yang terdiri dari pemeriksaan/pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu seperti Hotel, Restoran, Bar, Klab Malam, Diskotik, Swalayan/Supermarket, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tempat usaha/kegiatan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek <del>termasuk izin tetap, izin operasional, dan izin insidentil</del> kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(8) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan persyaratan/dokumen administrasi dan teknis, penatausahaan dan pengawasan.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu seperti Hotel, Restoran, Bar, Klab Malam, Diskotik, Swalayan/Supermarket, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tempat usaha/kegiatan di kawasan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>(8) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>mendirikan bangunan, Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB.</p> <p>2. Dalam hal bangunan tersebut sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi bangunan yang diatur dalam RTRW, maka dapat diberikan Sertifikat Laik Fungsi dan tidak dikenakan retribusi IMB.</p> <p>3. Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi bangunan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.</p> <p>4. Izin Operasi dan Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p>
3.	Subjek	<p>Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol dan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.</p> <p>(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																		
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan, dihitung berdasarkan hasil perkalian Indeks terintegrasi bangunan gedung, besaran luas lantai bangunan, indeks kegiatan pembangunan serta harga satuan retribusi.</p> <p>(1a) Nilai Indeks terintegrasi bangunan gedung meliputi Indeks Parameter Fungsi Bangunan, Indeks Klasifikasi Bangunan serta Indeks waktu Penggunaan Bangunan, dengan nilai indeks masing-masing sebagai berikut:</p> <p>a. Fungsi Bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hunian</td> <td>0,05</td> <td>Rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hunian</td> <td>0.50</td> <td>Rumah Tunggal biasa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Klasifikasi Bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Para meter</th> <th>bobot</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kompleksitas</td> <td>0,25</td> <td>Sederhana</td> <td>0,40</td> <td>Dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tidak sederhana</td> <td>0,70</td> <td>Dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Parameter	Indeks	Keterangan	1.	Hunian	0,05	Rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana	2.	Hunian	0.50	Rumah Tunggal biasa		Dst...			No	Para meter	bobot	Parameter	Indeks	Keterangan	1.	Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	Dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi				Tidak sederhana	0,70	Dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Parameter	Indeks	Keterangan																																			
1.	Hunian	0,05	Rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana																																			
2.	Hunian	0.50	Rumah Tunggal biasa																																			
	Dst...																																					
No	Para meter	bobot	Parameter	Indeks	Keterangan																																	
1.	Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	Dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi																																	
			Tidak sederhana	0,70	Dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
					Khusus	1,00	Memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan teknologi khusus		
					Dst...				
		c. Waktu Penggunaan Bangunan							
		No	Parameter	Indeks	Keterangan				
		1.	Sementara jangka pendek	0,40	Masa pemanfaatan bangunan, paling lama 6 bulan				
		2.	Sementara jangka menengah	0,70	Masa pemanfaatan bangunan, paling lama 3 tahun				
		3.	Tetap	1,00	Masa pemanfaatan bangunan, lebih dari 3 tahun				
		(1b) Contoh penetapan indeks terintegrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.							
		(1c) Indeks kegiatan Pembangunan Gedung mengkategorikan bangunan gedung, antara lain, baru akan didirikan, rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran, dengan nilai indeks sebagai berikut :							
		No	Parameter	Indeks					
		1.	Pembangunan gedung baru	1,00					
		2.	Rehabilitasi/renovasi rusak sedang	0,45					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		<table border="1" data-bbox="526 279 1153 359"> <tr> <td data-bbox="526 279 593 319">3.</td> <td data-bbox="593 279 907 319">Rehabilitasi/renovasi rusak berat</td> <td data-bbox="907 279 1153 319">0,65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 319 593 359"></td> <td data-bbox="593 319 907 359">Dst...</td> <td data-bbox="907 319 1153 359"></td> </tr> </table> <p data-bbox="470 359 1153 702">(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol secara terus menerus di wilayah Daerah.  (3) Dihapus.  (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis perizinan serta sarana prasarana yang digunakan dalam pengawasan dan monitoring, serta pembinaan trayek di wilayah Daerah.  (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam usaha perikanan di wilayah Daerah.</p>	3.	Rehabilitasi/renovasi rusak berat	0,65		Dst...																																	
3.	Rehabilitasi/renovasi rusak berat	0,65																																						
	Dst...																																							
		-	<p data-bbox="1176 710 1859 742">Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1176 774 1344 805">A. Hotel Bintang</p> <ul data-bbox="1209 805 1388 829" style="list-style-type: none"> <li>o Hotel Bintang 1</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1243 829 1859 949"> <thead> <tr> <th data-bbox="1243 829 1299 861">No.</th> <th data-bbox="1299 829 1668 861">Golongan Minuman</th> <th data-bbox="1668 829 1859 861">Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1243 861 1299 885">1</td> <td data-bbox="1299 861 1668 885">Minuman Golongan A</td> <td data-bbox="1668 861 1859 885">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 885 1299 909">2</td> <td data-bbox="1299 885 1668 909">Minuman Golongan B</td> <td data-bbox="1668 885 1859 909">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 909 1299 933">3</td> <td data-bbox="1299 909 1668 933">Minuman Golongan C</td> <td data-bbox="1668 909 1859 933">.....</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="1209 973 1388 997" style="list-style-type: none"> <li>o Hotel Bintang 2</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1243 997 1859 1117"> <thead> <tr> <th data-bbox="1243 997 1299 1029">No.</th> <th data-bbox="1299 997 1668 1029">Golongan Minuman</th> <th data-bbox="1668 997 1859 1029">Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1243 1029 1299 1053">1</td> <td data-bbox="1299 1029 1668 1053">Minuman Golongan A</td> <td data-bbox="1668 1029 1859 1053">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 1053 1299 1077">2</td> <td data-bbox="1299 1053 1668 1077">Minuman Golongan B</td> <td data-bbox="1668 1053 1859 1077">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 1077 1299 1101">3</td> <td data-bbox="1299 1077 1668 1101">Minuman Golongan C</td> <td data-bbox="1668 1077 1859 1101">.....</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="1209 1157 1388 1181" style="list-style-type: none"> <li>o Hotel Bintang 3</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1243 1181 1859 1300"> <thead> <tr> <th data-bbox="1243 1181 1299 1212">No.</th> <th data-bbox="1299 1181 1668 1212">Golongan Minuman</th> <th data-bbox="1668 1181 1859 1212">Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1243 1212 1299 1236">1</td> <td data-bbox="1299 1212 1668 1236">Minuman Golongan A</td> <td data-bbox="1668 1212 1859 1236">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 1236 1299 1260">2</td> <td data-bbox="1299 1236 1668 1260">Minuman Golongan B</td> <td data-bbox="1668 1236 1859 1260">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1243 1260 1299 1284">3</td> <td data-bbox="1299 1260 1668 1284">Minuman Golongan C</td> <td data-bbox="1668 1260 1859 1284">.....</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1176 1332 1512 1356">B. Hotel Melati, Wisma, dan Cottage</p>	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	<p data-bbox="1881 718 2161 1340">1. Ditambah perubahan atas Lampiran II Perda No. 4 Tahun 2012.  2. Sesuai dengan Pasal 7 Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, hanya minuman beralkohol golongan A yang dapat dijual secara eceran dalam bentuk kemasan.  3. Sesuai dengan Permendag No. 6/M-DAG/PER/II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjualan minuman beralkohol</p>
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																						
1	Minuman Golongan A	.....																																						
2	Minuman Golongan B	.....																																						
3	Minuman Golongan C	.....																																						
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																						
1	Minuman Golongan A	.....																																						
2	Minuman Golongan B	.....																																						
3	Minuman Golongan C	.....																																						
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																						
1	Minuman Golongan A	.....																																						
2	Minuman Golongan B	.....																																						
3	Minuman Golongan C	.....																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
			<table border="1" data-bbox="1249 280 1861 400"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Golongan Minuman</th> <th>Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minuman Golongan A</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minuman Golongan B</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Minuman Golongan C</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1178 427 1715 451">C. Restoran, Bar, Pub, Kelab Malam, Diskotik dan Karaoke</p> <table border="1" data-bbox="1249 451 1861 571"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Golongan Minuman</th> <th>Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minuman Golongan A</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minuman Golongan B</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Minuman Golongan C</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1178 603 1397 627">D. Dijual secara eceran</p> <p data-bbox="1216 635 1391 659">o Toko Bebas Bea</p> <table border="1" data-bbox="1249 659 1861 778"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Golongan Minuman</th> <th>Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minuman Golongan A</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minuman Golongan B</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Minuman Golongan C</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1216 810 1711 834">o Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p> <table border="1" data-bbox="1249 834 1861 954"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Golongan Minuman</th> <th>Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minuman Golongan A</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Minuman Golongan B</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Minuman Golongan C</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1216 986 1480 1010">o Supermarket/Hypemarket</p> <table border="1" data-bbox="1249 1010 1861 1066"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Golongan Minuman</th> <th>Tarif (Rp)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minuman Golongan A</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	2	Minuman Golongan B	.....	3	Minuman Golongan C	.....	No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun	1	Minuman Golongan A	.....	<p data-bbox="1906 280 2157 507">golongan A secara eceran dapat dilakukan di Toko Bebas Bea, tempat tertentu lainnya yang diatur oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta, <i>supermarket</i> dan <i>hypemarket</i>.</p>
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																																								
1	Minuman Golongan A	.....																																																								
2	Minuman Golongan B	.....																																																								
3	Minuman Golongan C	.....																																																								
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																																								
1	Minuman Golongan A	.....																																																								
2	Minuman Golongan B	.....																																																								
3	Minuman Golongan C	.....																																																								
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																																								
1	Minuman Golongan A	.....																																																								
2	Minuman Golongan B	.....																																																								
3	Minuman Golongan C	.....																																																								
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																																								
1	Minuman Golongan A	.....																																																								
2	Minuman Golongan B	.....																																																								
3	Minuman Golongan C	.....																																																								
No.	Golongan Minuman	Tarif (Rp)/tahun																																																								
1	Minuman Golongan A	.....																																																								
			<p data-bbox="1178 1086 1816 1110">Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1178 1129 1357 1153">1. Izin Trayek Baru</p> <table border="1" data-bbox="1216 1153 1861 1337"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>s.d 8 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penumpang</td> <td>9 s.d 15 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16 s.d 25 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>&gt;25 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Angkutan Khusus</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Angkutan	Kapasitas	Tarif (Rp)	1	Mobil Penumpang	s.d 8 orang	.....	2	Penumpang	9 s.d 15 orang	.....			16 s.d 25 orang	.....			>25 orang	.....	3	Angkutan Khusus		.....	<p data-bbox="1872 1086 2141 1348">1. Ditambah perubahan atas Lampiran IV Perda No. 4 Tahun 2012. 2. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. 3. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut</p>																														
No.	Jenis Angkutan	Kapasitas	Tarif (Rp)																																																							
1	Mobil Penumpang	s.d 8 orang	.....																																																							
2	Penumpang	9 s.d 15 orang	.....																																																							
		16 s.d 25 orang	.....																																																							
		>25 orang	.....																																																							
3	Angkutan Khusus		.....																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																													
			2. Perpanjangan Izin Trayek (per 5 tahun) <table border="1" data-bbox="1220 319 1863 502"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>s.d 8 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penumpang</td> <td>9 s.d 15 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>16 s.d 25 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>&gt;25 orang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Angkutan Khusus</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Angkutan	Kapasitas	Tarif (Rp)	1	Mobil Penumpang	s.d 8 orang	.....	2	Penumpang	9 s.d 15 orang	.....			16 s.d 25 orang	.....			>25 orang	.....	3	Angkutan Khusus		.....	sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun). 4. Izin Operasi dan Izin Insidentil tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek. 5. Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum, sehingga tidak perlu tarif tersendiri.																					
No.	Jenis Angkutan	Kapasitas	Tarif (Rp)																																														
1	Mobil Penumpang	s.d 8 orang	.....																																														
2	Penumpang	9 s.d 15 orang	.....																																														
		16 s.d 25 orang	.....																																														
		>25 orang	.....																																														
3	Angkutan Khusus		.....																																														
			Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1176 774 1863 1359"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Usaha Perikanan</th> <th>Besarnya tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izin Budidaya di Air Tawar (dikenakan sekali selama usaha berlangsung atau tidak ada perubahan jenis usaha/kapasitas usaha)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pembenihan</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pembesaran</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pembenihan dan Pembesaran</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (ukuran .....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SIKPI</td> <td>...../GT/Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	1.	Izin Budidaya di Air Tawar (dikenakan sekali selama usaha berlangsung atau tidak ada perubahan jenis usaha/kapasitas usaha)	.....		a. Pembenihan	.....		- Kecil (ukuran .....)	.....		- Menengah (ukuran .....)	.....		- Besar (ukuran .....)	.....		b. Pembesaran	.....		- Kecil (ukuran .....)	.....		- Menengah (ukuran .....)	.....		- Besar (ukuran .....)	.....		c. Pembenihan dan Pembesaran	.....		- Kecil (ukuran .....)	.....		- Menengah (ukuran .....)	.....		- Besar (ukuran .....)	.....	2.	SIKPI	...../GT/Tahun	1. Ditambah perubahan atas Lampiran IV Perda No. 4 Tahun 2012. 2. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI. 3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. 4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)																																															
1.	Izin Budidaya di Air Tawar (dikenakan sekali selama usaha berlangsung atau tidak ada perubahan jenis usaha/kapasitas usaha)	.....																																															
	a. Pembenihan	.....																																															
	- Kecil (ukuran .....)	.....																																															
	- Menengah (ukuran .....)	.....																																															
	- Besar (ukuran .....)	.....																																															
	b. Pembesaran	.....																																															
	- Kecil (ukuran .....)	.....																																															
	- Menengah (ukuran .....)	.....																																															
	- Besar (ukuran .....)	.....																																															
	c. Pembenihan dan Pembesaran	.....																																															
	- Kecil (ukuran .....)	.....																																															
	- Menengah (ukuran .....)	.....																																															
	- Besar (ukuran .....)	.....																																															
2.	SIKPI	...../GT/Tahun																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :</p> <p>a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang izin; dan</p> <p>b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup ..... (sebagian atau seluruh) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya :</p> <p>a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha dari pemegang izin; dan</p> <p>b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin meliputi aspek teknis, lingkungan dan keselamatan umum serta pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Disesuaikan dengan kebijakan Pemda dalam menetapkan tarif pelayanan perizinan, apakah untuk menutup sebagian biaya atau menutup seluruh biaya.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 10 dihapus.	Pasal 10 tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai masa Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. <del>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan per tahun;</del></p> <p>b. <del>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan per tahun;</del></p> <p>c. <del>Retribusi Izin Trayek ditetapkan per tahun; dan</del></p> <p>d. <del>Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan per tahun.</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>Retribusi terutang sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 1 angka 70 UU No. 28 Tahun 2009, Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda.</p> <p>Untuk retribusi perizinan tertentu, masa retribusi dapat diatur sama dengan masa izin dan cukup diatur dalam struktur tarif.</p>
		<p>Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian izin.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>



Jakarta, 31 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*(Signature)*  
A. Lisbon Sirait